

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari sisi akuntabilitas informatif, Pemerintah Nagari Kurai pada dasarnya telah memiliki kriteria dan basis data yang jelas, berupa klasifikasi desil dan data SDGs, untuk menentukan sasaran penerima BLT-DD. Namun penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat masih bersifat reaktif, mengandalkan pengeras suara masjid dan pemberitahuan langsung, tanpa mekanisme publikasi yang terbuka dan bisa diakses sewaktu-waktu. Akibatnya, sebagian masyarakat, terutama non-penerima, mengaku tidak memahami secara jelas kriteria penetapan maupun alasan perubahan status kepesertaan.
2. Akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran BLT-DD periode 2024-2026 secara umum telah terlaksana pada tataran prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif. Pemerintah Nagari telah memiliki kriteria dan basis data penerima melalui klasifikasi desil dan data SDGs serta melaksanakan musyawarah dan menyediakan ruang pengaduan masyarakat. Namun, penyampaian informasi masih cenderung reaktif dan belum didukung publikasi yang terbuka, forum musyawarah belum sepenuhnya menjadi ruang deliberasi yang substantif, serta mekanisme pengaduan belum memberikan kepastian tindak lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kriteria penerima maupun perubahan status kepesertaan BLT-DD.
3. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan BLT-DD di Nagari Kurai pada dasarnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan perlindungan ekonomi masyarakat rentan, tetapi implementasinya

masih menghadapi persoalan keadilan distributif, amanah dalam pengelolaan informasi, dan syura yang inklusif. Penelitian ini tidak menemukan indikasi penyelewengan dana secara sengaja, sehingga persoalan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kelemahan tata kelola, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tetap berpengaruh terhadap rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas penyaluran BLT-DD perlu diperkuat tidak hanya dari sisi kepatuhan prosedural, tetapi juga melalui transparansi informasi, pelibatan unsur masyarakat secara lebih substantif, serta mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif bagi para pemangku kepentingan:

Pemerintah Nagari Kurai disarankan untuk melakukan pemutakhiran dan penyatuan data penerima BLT-DD secara berkala serta menyampaikan kriteria dan daftar penerima secara terbuka dan tertulis. Bamus perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui verifikasi lapangan, sementara Kerapatan Adat Nagari Kurai dan tokoh ulama perlu dilibatkan dalam musyawarah penetapan penerima untuk memperkuat prinsip syura dan legitimasi kebijakan. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat perlu didokumentasikan dan dilengkapi dengan kepastian tindak lanjut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam penelitian melalui penelusuran dokumen resmi nagari guna memperkuat dan memverifikasi temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, I. 2006. *Al-Ahkam As-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Terjemahan). Jakarta: Darul Falah.
- Al-Maududi, Abu a'la. 1993. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan
- Anggraini, P., Nur, E. R., & Mu'in, F. 2025. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11, (1): 124–138.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. 2020. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?* In Centre for Strategic and International Studies.
- Bovens, M. 2006. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal* 4,(4): 13.
- Creswell, J. W. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edition 6). California: Sage Publications.
- Djazuli, A. 2020. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Yogyakarta: Predamedia Group Kencana.
- Fadhli, K., & Nazila, L. 2023. "Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Education and Development*, 11, (2): 11.
- Gunawan, & Algiyanto, D. 2023. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Jurnal Ilmiah*, 21, (1): 45
- Hamidah, & Pebriyani, D. 2026. "Pengaruh Transparansi, Target Anggaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review* 3,(4): 15-20.
- Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Yogyakarta: Prenamedia Group Kencana.
- Iqbal, M. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Izzah, F. F. 2025. *Fikih Siyasah dan Ketatanegaraan: Teori dan Praktik Kontemporer*. Sleman: Uma Karya Sejahtera.
- Imam an-Nawawi. 2011. *Syarah Shahih Muslim, Jilid XII*, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mahmudi. 2016. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.

- Muthallin, F., & Fauzi, M. 2019. "Etika Birokrasi dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8,(2): 233-235.
- Nabilatas P, P. K. 2026. "Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung." *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.
- Nur, H. 2022. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Dipemerintahan Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Islam Riau.
- Nurhajjah. 2024. "Pengaruh Program Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana sebagai Variabel Moderating." *Thesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Pratama, Y. 2024. "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pulungan, J. S. 2014. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Purwaka, T. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Raba Raba, M. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (2nd ed.). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ridwan. 2001. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sakir, I. M. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method*. Yogyakarta: Filosofi Indonesia Press.
- Salim, Muhammad Al-Awwa. 1989. *Fi Al-Nizham Al-Siyasi Li Al-Dawlah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Sawir, M. 2022. *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama .
- Siagian, A.W., Fajar, H.F., & Alify, R. F. 2023. " Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12,(1): 137–152.
- Studies, M., & April, B. 2022. "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar." *Journal of Management Studies*, 16,(1): 51–63.
- Suharto, E. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Ash Shiddieqy,Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang:

Pustaka Rizki Putra.

- Rahmi, A. Y., & Dantes, R. 2026. "Implementasi Kebijakan Pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus Nagari Bahagia Padang Gelugur Pasaman Timur)." *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 5,(3): 316.
- Roulina Hoppeny Butar Butar. 2024. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Sosial." *Jurnal Administrasi Publik*, 12,(1): 38-51.
- Taj, A. 1993. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.
- Suliki, P. N. K. 2022. *Demografi Penduduk*. Nagari Kurai Suliki. <https://kuraifuliki.id/read/demografi-penduduk>.
- Ulpa, S. M., & Martingsih, Rr, S. P. 2025. "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9, (85): 98.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Sekretariat Negara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Padang: Bumi Aksara.